



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP INDIVIDU
YANG TERLIBAT DALAM TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI
PLATFORM MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum**

Disusun oleh:

ZIDANE ARRASYA RIZKIKA AKBAR

NPM. 201003742018072

SEMARANG

2024



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG FAKULTAS
HUKUM**

**PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM TERHADAP INDIVIDU YANG
TERLIBAT DALAM TINDAK PIDANA PORNOGRAFI DI PLATFORM
MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji dan
memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan Program
Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh :

ZIDANE ARRASYA RIZKIKA AKBAR

NPM. 201003742018072

Mengesahkan :

Tim Penguji Ketua,

ABDUL KHOLIQ S.H.,M.H.

NIDN.0612036501

Anggota

DR. BAMBANG JOYO S., S.H., M.HUM
NIDN.06-0902-6301

Anggota

DR. MOCH RIYANTO S.H., M.SI
NIDN.06-0201-6201



PROF. DR. EDY LISDIYONO, S.H., M.HUM
NIDN.06-2504-6301

SEMARANG 2024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan Skripsi.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Umum Tentang Pidana	10
B. Pertanggung Jawaban Hukum	16
C. Tindak pidana cyber crime	15
BAB III METODE PENELITIAN	19
A. Tipe Penelitian	19
B. Spesifikasi Penelitian dan Sumber Data	20
C. Metode Pengumpulan Data.....	22
D. Metode Penyajian Data	23
E. Metode Analisa Data	24
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	25
A. Pengaturan tindak pidana pornografi yang terjadi dimedia sosial.....	25
B. Pertanggung jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pornografi di media sosial	41

BAB V PENUTUP.....	53
A. KESIMPULAN.....	53
B. SARAN.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	56

ABSTRAK

Setiap orang yang terlibat, terutama orang tua, merasa tertekan dengan meningkatnya kekerasan seksual terhadap anak-anak, baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun teman sebayanya. Anak-anak sering kali merasa tidakberdaya dan terkena dampak kekerasan seksual; Akibatnya, korban seringkalimerasa tersiksa dan tidak berdaya ketika menceritakan kejadian yang menimpanya. Penegakan hukum perlu mengatasi insiden kekerasan seksual karena, secara emosional, korban kejahatan ini mungkin mengalami keputusasaan, kecemasan, ketegangan, dan bahkan menyalahkan diri sendiri dan rasa malu. Dalam penelitian ini, kita melihat bagaimana Polres Purworejo menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana agar peraturan di Purworejo yang melarang pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dapat dipatuhi, serta tantangan dan solusi terhadap permasalahan tersebut. Wawancara, tinjauan pustaka, dan analisis dokumen merupakan metode utama pengumpulan data dalam kajian hukum normatif empiris ini. Berdasarkan temuan penelitian, tampaknya pelecehan seksual terhadapAmak tidak dikriminalisasi oleh penegak hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi tantangan saat ini adalah dengan meningkatkan penyediaan infrastruktur dan menciptakan kondisi yang sesuai, seperti melakukan pemeriksaan khusus bagi anak-anak yang terlibat hukum. Diyakini bahwa dengan fasilitas yang memadai, perlindungan hukum dapat ditegakkan secara lebih efektif, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan ancaman fisik dan kekerasan

Kata kunci : Pornografi, Kekerasan Seksual dan mrdia sosial